



## KPK Ingatkan Pelaku Pendidikan

**YOGYAKARTA** – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menggarap sektor pendidikan dan kesehatan di Kota Yogyakarta. Kemarin, tim KPK menggelar *focus group discussion* (FGD) pencegahan korupsi pada dua sektor itu.

Direktur Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK Roni Dwi Susanto mengungkapkan, pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari *national interest* yang ditetapkan KPK, selain infrastruktur, penerimaan, dan mineral batubara serta gas.

Pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu *interest* KPK karena langsung dirasakan masyarakat. Apalagi dana yang dialokasikan untuk dua sektor ini yang seharusnya dirasakan langsung masyarakat cukup besar. Belum lagi sektor pendidikan, berdasarkan temuan KPK sudah dimasukinya ranah politik.

Ke Hal 10

---

**(Dari Hal 9**

Initerjadi pada bantuan siswa miskin di mana partai politik (parpol) mendatangi calon penerima dan memberikan selebar cek agar dicairkan sebagai bantuan pendidikan. Akan tetapi penerima diminta memilih parpol pemberinya. "Kami punya semua datanya dan ini sekarang mulai terjadi menjelang pilkada serentak. Modusnya, data diambil parpol sebagian lalu dibagikan karena sekolah sendiri *kan* tidak tahu siapa saja dari nama yang diusulkan yang kemudian menerima bantuan," papar Roni, kemarin.

Modus lain yang banyak terjadi adalah pada data pokok pendidikan, guru yang sudah tidak ada tapi masih tercatat, dana sekolah terkait sarana prasarana, guru penerima sertifikat terkena potongan oleh dinas terkait, hingga rekayasa jam mengajar. "Kami perlu masuk ke sektor ini karena berkaitan langsung dengan masyarakat. Sekarang coba lihat sekolah di pelosok masih banyak yang jelek, di daerah lain untuk sekedar berangkat sekolah saja nyawa menjadi taruhannya," tuturnya.

Dia pun berharap guru bisa menjaga moral anak-anak didiknya. "Dulu guru tanpa tanda jasa, sekarang gajinya sudah besar. Fungsinya mungkin sudah berubah. Jangan sampai karena mengejar tunjangan profesi, akhirnya merekaayasa jam mengajar. Pendidikan harus benar-benar dirasakan masyarakat, anak-anak, maupun orangtua," katanya.

Seperti halnya pendidikan, kesehatan juga menjadi garapan serius. Apalagi tak sedikit masyarakat yang jatuh miskin karena sakit. Bahkan ada yang sakit tapi ditolak manajemen rumah sakit. Dengan demikian, KPK harus mengawal dana kesehatan yang dibayarkan pemerintah untuk penerima bantuan iuran (PBI) senilai Rp1,1 triliun. Dengan pengawalan ini diharapkan BPJS bertindak benar tidak hanya untuk warga miskin tapi juga seluruh masyarakat. "Jangan sampai seperti di Ende, masyarakat butuh selimut karena endemik malaria. Tapi di sana tidak terselimiuti karena takut salah jika dibelikan selimut. Kami ingin mengawal semuanya berjalan baik," katanya.

Dia mengungkapkan, di sektor kesehatan banyak modus yang dilakukan untuk korupsi. Misalnya, data kepesertaan, orang meninggal masih diklaim. Belum lagi dana kapitasi perpindahan peserta dari puskesmas ke klinik yang menghasilkan selisih pembayaran Rp4.000. "Ada juga *upcoding* dan *unbundling* hingga penanganan yang tidak perlu untuk mengejar klaim agar lebih besar. Kami berharap Yogyakarta bisa menjadi contoh bagi daerah lain," katanya.

Sekda Kota Yogyakarta Titik Sulastri mengakui, pendidikan dan kesehatan rentan tindak pidana korupsi. Karena itu, dia berharap FGD akan memberi banyak manfaat karena menjadi salah satu langkah memetakan potensi korupsi dan menggali langkah antisipasinya.

• sodik

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kesehatan			

Yogyakarta, 17 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005